Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
6 (2) 2026, Page: 31529-31534

DINAMIKA INFRASTRUKTUR JALAN DI KECAMATAN LAWANG KIDUL (STUDI PADA AKTIVITAS PERUSAHAAN ALAT BERAT)

Yolanda[1], Ainur Ropik[2], Dumyati[3]

[1]Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
[2]Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Prodi Ilmu Politik

Corresponding Author : Yolanda, e-mail : ylnnda1911@gmail.com.

Published: Juni, 2026

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis dinamika politik pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Lawang Kidul yang dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan alat berat serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pembangunan jalan di wilayah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri dari pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), perusahaan, tokoh masyarakat, dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Lawang Kidul tidak hanya merupakan persoalan teknis, tetapi juga melibatkan kepentingan politik, ekonomi, dan sosial antara pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat. Aktivitas kendaraan alat berat dan angkutan batu bara menjadi salah satu penyebab utama kerusakan jalan. Pemerintah daerah berupaya melakukan pembangunan dan perbaikan jalan melalui perencanaan pembangunan daerah, sementara perusahaan turut berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Faktor pendukung pembangunan meliputi dukungan pemerintah, kontribusi perusahaan, serta partisipasi masyarakat. Adapun faktor penghambatnya meliputi tingginya intensitas kendaraan berat, keterbatasan anggaran, lemahnya pengawasan, dan kondisi lingkungan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur jalan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Dinamika Politik, Pembangunan Infrastruktur, Jalan, Perusahaan Alat Berat, Lawang Kidul.

ABSTACT

This study aims to analyze the political dynamics of road infrastructure development in Lawang Kidul District, influenced by the activities of heavy equipment companies, and to identify supporting and inhibiting factors in road construction in the region. The research method used was a qualitative descriptive approach. Data were obtained through observation, interviews, and documentation with informants from the Public Works and Spatial Planning (PUPR) Department, companies, community leaders, and the local community. The results indicate that road infrastructure development in Lawang Kidul District is not merely a technical issue but also involves political, economic, and social interests between the local government, companies, and the community. Heavy equipment and coal transportation activities are among the main causes of road damage. The local government strives to build and repair roads through regional development planning, while companies contribute through corporate social responsibility (CSR) programs. Supporting factors include government support, company contributions, and community participation. Inhibiting factors include the high traffic volume of heavy vehicles, budget constraints, weak oversight, and environmental conditions. This study concludes that synergy between the government, companies, and the community is essential to realizing sustainable road infrastructure development that is oriented towards community welfare.

***Keywords**: Political Dynamics, Infrastructure Development, Roads, Heavy Equipment Companies, Lawang Kidul.*

PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur jalan merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan mobilitas masyarakat, serta memperlancar distribusi barang dan jasa. Jalan memiliki peran strategis sebagai sarana penghubung antarwilayah yang mendukung berbagai aktivitas sosial, ekonomi, pendidikan, dan pemerintahan. Ketersediaan infrastruktur jalan

yang baik dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat, mendorong investasi, serta mempercepat pembangunan daerah. Sebaliknya, kondisi jalan yang rusak dapat menghambat aktivitas masyarakat dan menurunkan kualitas pelayanan publik. (Papers & Governance, 2020)

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, infrastruktur jalan tidak hanya dipandang sebagai sarana fisik semata, tetapi juga sebagai bagian dari proses pembangunan yang melibatkan berbagai kepentingan dan aktor. (Ahmad Susilo, 2023) Pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat memiliki peran masing-masing dalam menentukan arah pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan jalan sering kali menjadi bagian dari dinamika politik pembangunan yang melibatkan interaksi, kerja sama, maupun perbedaan kepentingan antaraktor. (Fefriyanto, 2025)

Kecamatan Lawang Kidul merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Muara Enim yang memiliki aktivitas pertambangan dan industri yang cukup tinggi. Keberadaan perusahaan pertambangan serta aktivitas kendaraan alat berat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.(Gandus et al., 2026) Namun, aktivitas tersebut juga berdampak pada kondisi infrastruktur jalan. Tingginya intensitas kendaraan bertonase besar yang melintas setiap hari menyebabkan banyak ruas jalan mengalami kerusakan, seperti retak, berlubang, dan penurunan kualitas permukaan jalan. infrastruktur.(Akbar, 2022)

Kerusakan jalan yang terjadi di Kecamatan Lawang Kidul menimbulkan berbagai dampak bagi masyarakat. Kondisi jalan yang rusak mengganggu mobilitas masyarakat, meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas, serta menambah biaya operasional kendaraan. Masyarakat sering kali mengeluhkan lambatnya perbaikan jalan, sementara perusah persoalan dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan jalan.(Samiruddin, 2025) masih terus menggunakan jalan tersebut untuk menunjang aktivitas operasionalnya. Kondisi ini menunjukkan adanya hubungan yang kompleks antara pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan.(Putri et al., 2021)

Dalam perspektif politik pembangunan, pembangunan jalan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut proses pengambilan keputusan, distribusi sumber daya, dan hubungan kekuasaan antara berbagai pihak yang terlibat. (Devanda, 2025) Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan pembangunan, perusahaan memiliki kepentingan ekonomi terhadap kelancaran aktivitas usaha, sedangkan masyarakat menginginkan infrastruktur yang aman dan layak digunakan.Perbedaan kepentingan tersebut menciptakan dinamika politik yang memengaruhi proses pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Lawang Kidul. (UNPD, 1997)

Menurut Soetomo (2013), pembangunan merupakan proses perubahan sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan. Pembangunan yang baik tidak hanya berorientasi pada hasil fisik, tetapi juga memperhatikan partisipasi masyarakat dan dampak sosial yang ditimbulkan. Dalam konteks pembangunan infrastruktur jalan, teori ini relevan untuk menjelaskan bagaimana pemerintah, perusahaan, dan masyarakat berinteraksi dalam proses pembangunan. (Hagai et al., 2025)

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika politik pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Lawang Kidul pada aktivitas perusahaan alat berat serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat pembangunan infrastruktur jalan.(Ermelinda Ngeni, 2025) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam pembangunan jalan serta menjadi masukan bagi pihak terkait dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang lebih efektif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis dinamika politik pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Lawang Kidul pada aktivitas perusahaan alat berat. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri dari pihak Dinas PUPR, perusahaan, tokoh masyarakat, dan masyarakat setempat. Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data

diuji menggunakan triangulasi sumber. Metode ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai hubungan antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan. (Sutrisno, 2021)

SUMBER DATA

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui proses observasi dan wawancara dengan informan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian. Informan dalam penelitian ini meliputi pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Muara Enim, staf perusahaan yang terlibat dalam program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), tokoh masyarakat, serta masyarakat Kecamatan Lawang Kidul yang merasakan secara langsung dampak pembangunan dan kondisi infrastruktur jalan. Menurut Sugiyono, data primer adalah sumber data yang memberikan informasi secara langsung kepada peneliti.

Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai dokumen pendukung, seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, laporan pemerintah, serta dokumen lain yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur jalan dan dinamika politik pembangunan. Data sekunder digunakan untuk memperkuat analisis dan memberikan landasan teoritis yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Menurut Moleong, data sekunder berfungsi sebagai pelengkap data primer untuk membantu peneliti memahami fenomena yang diteliti secara lebih mendalam. (Palazzolo, 2023)

Penggunaan data primer dan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan secara terpadu agar menghasilkan informasi yang lengkap dan akurat. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan dibandingkan melalui teknik triangulasi untuk memastikan validitas data. Dengan memanfaatkan kedua sumber data tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dinamika politik pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Lawang Kidul pada aktivitas perusahaan alat berat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dinamika Politik Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kecamatan Lawang Kidul pada Aktivitas Perusahaan Alat Berat

Pembangunan infrastruktur jalan merupakan salah satu program pembangunan yang memiliki peran penting dalam meningkatkan mobilitas masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Di Kecamatan Lawang Kidul, pembangunan jalan menjadi kebutuhan yang sangat penting karena wilayah ini merupakan kawasan yang memiliki aktivitas industri dan pertambangan yang cukup tinggi. Keberadaan perusahaan alat berat dan kendaraan angkutan batu bara yang beroperasi setiap hari menjadikan jalan sebagai sarana utama yang harus mampu menunjang aktivitas ekonomi sekaligus kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan jalan di Kecamatan Lawang Kidul tidak hanya dipandang sebagai pembangunan fisik semata, tetapi juga menjadi bagian dari dinamika politik pembangunan yang melibatkan pemerintah, perusahaan, dan masyarakat.

Dalam proses pembangunan jalan, pemerintah daerah memiliki peran utama sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Pemerintah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) melakukan identifikasi kebutuhan pembangunan berdasarkan kondisi jalan yang ada serta usulan yang disampaikan masyarakat. Perencanaan pembangunan dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang melibatkan berbagai unsur masyarakat. Melalui forum tersebut masyarakat dapat menyampaikan berbagai aspirasi mengenai kondisi jalan yang rusak dan kebutuhan pembangunan yang dianggap mendesak.

Berdasarkan hasil penelitian, proses perencanaan pembangunan jalan di Kecamatan Lawang Kidul telah melibatkan partisipasi masyarakat. Namun demikian, tidak seluruh usulan masyarakat dapat langsung direalisasikan karena harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran pemerintah daerah. Selain itu, pemerintah juga harus mempertimbangkan tingkat kerusakan jalan, jumlah

pengguna jalan, serta urgensi pembangunan pada masing-masing wilayah. Kondisi ini sering kali menimbulkan perbedaan pandangan antara masyarakat dan pemerintah terkait prioritas pembangunan yang harus dilakukan.

Keberadaan perusahaan alat berat di Kecamatan Lawang Kidul juga memiliki pengaruh yang besar terhadap pembangunan infrastruktur jalan. Sebagai wilayah yang memiliki aktivitas pertambangan cukup tinggi, sebagian besar jalan digunakan sebagai jalur operasional kendaraan perusahaan. Aktivitas kendaraan bertonase besar yang berlangsung setiap hari memberikan dampak langsung terhadap kondisi jalan. Banyak ruas jalan mengalami kerusakan akibat beban kendaraan yang melebihi kapasitas daya dukung jalan. Kerusakan tersebut berupa retakan, lubang, amblas, hingga kerusakan lapisan aspal yang menyebabkan jalan menjadi tidak nyaman dan berbahaya bagi pengguna.

Di sisi lain, perusahaan juga memiliki tanggung jawab sosial terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar wilayah operasionalnya. Bentuk tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) yang salah satunya berupa bantuan pembangunan dan perbaikan jalan. Program ini menunjukkan adanya kerja sama antara pemerintah dan perusahaan dalam mendukung pembangunan daerah. Akan tetapi, berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, bantuan yang diberikan perusahaan dinilai belum sepenuhnya mampu mengatasi kerusakan jalan yang terjadi. Hal ini disebabkan tingginya intensitas kendaraan perusahaan yang terus melintasi jalan sehingga kerusakan kembali terjadi dalam waktu yang relatif singkat.

Dinamika politik pembangunan juga terlihat dari adanya perbedaan kepentingan antara masyarakat dan perusahaan. Masyarakat menginginkan kondisi jalan yang aman dan nyaman untuk digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Sementara itu, perusahaan membutuhkan akses jalan yang memadai untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional dan distribusi hasil produksi. Perbedaan kepentingan tersebut sering kali menimbulkan berbagai tuntutan dari masyarakat agar perusahaan lebih bertanggung jawab terhadap kerusakan jalan yang terjadi akibat aktivitas kendaraan berat.

perspektif teori pembangunan Soetomo, pembangunan merupakan proses sosial yang harus melibatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan. Pembangunan yang baik tidak hanya berorientasi pada hasil fisik, tetapi juga harus memperhatikan dampak sosial yang ditimbulkan. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Lawang Kidul harus dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, kepentingan pembangunan daerah, serta keberlanjutan aktivitas ekonomi yang berlangsung di wilayah tersebut.

Hubungan antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan jalan. Pemerintah memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan pembangunan, perusahaan memiliki sumber daya ekonomi yang dapat mendukung pembangunan, sedangkan masyarakat merupakan pihak yang secara langsung merasakan manfaat maupun dampak dari pembangunan tersebut. Apabila ketiga unsur tersebut mampu bekerja sama dengan baik, maka pembangunan jalan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Dinamika politik pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Lawang Kidul menunjukkan bahwa pembangunan jalan bukan hanya persoalan teknis pembangunan fisik, melainkan juga berkaitan dengan hubungan kepentingan, proses pengambilan keputusan, serta interaksi antara berbagai aktor pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat agar pembangunan infrastruktur jalan dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Lawang Kidul pada Aktivitas Perusahaan Alat Berat

Pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Lawang Kidul dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya. Faktor-faktor tersebut berasal dari aspek pemerintahan, ekonomi, sosial, maupun kondisi lingkungan yang secara langsung memengaruhi keberhasilan pembangunan jalan. Identifikasi terhadap faktor pendukung dan penghambat sangat penting untuk mengetahui berbagai kondisi yang memengaruhi proses pembangunan sehingga dapat ditemukan solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan yang ada.

Salah satu faktor pendukung pembangunan infrastruktur jalan adalah adanya komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas infrastruktur. Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui Dinas PUPR secara rutin melakukan perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan jalan yang mengalami kerusakan. Pemerintah juga berupaya mengalokasikan anggaran pembangunan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kondisi jalan yang ada. Komitmen tersebut menunjukkan adanya perhatian pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat akan infrastruktur yang layak.

Faktor pendukung berikutnya adalah keterlibatan perusahaan dalam pembangunan melalui program CSR. Perusahaan yang beroperasi di Kecamatan Lawang Kidul memberikan kontribusi berupa bantuan pembangunan maupun perbaikan jalan yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan. Bantuan tersebut memberikan dampak positif bagi masyarakat karena dapat membantu mempercepat proses perbaikan jalan yang mengalami kerusakan. Selain itu, keberadaan perusahaan juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang pada akhirnya dapat mendukung pembangunan infrastruktur.

Partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting yang mendukung pembangunan jalan. Masyarakat secara aktif menyampaikan aspirasi dan keluhan terkait kondisi jalan melalui forum Musrenbang maupun melalui komunikasi langsung dengan pemerintah daerah. Partisipasi masyarakat memungkinkan pemerintah memperoleh informasi yang lebih akurat mengenai kondisi jalan dan kebutuhan pembangunan yang harus diprioritaskan. Dengan adanya keterlibatan masyarakat, pembangunan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Meskipun terdapat berbagai faktor pendukung, pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Lawang Kidul juga menghadapi sejumlah hambatan. Hambatan utama adalah tingginya intensitas kendaraan alat berat dan truk pengangkut batu bara yang melintasi jalan setiap hari. Kendaraan dengan beban yang sangat besar menyebabkan jalan mengalami kerusakan lebih cepat dibandingkan umur teknis yang seharusnya. Akibatnya, jalan yang baru diperbaiki sering kali kembali mengalami kerusakan dalam waktu yang relatif singkat.

Keterbatasan anggaran juga menjadi faktor penghambat pembangunan jalan. Meskipun pemerintah daerah terus berupaya melakukan pembangunan dan pemeliharaan jalan, kebutuhan perbaikan yang cukup besar sering kali tidak sebanding dengan kemampuan anggaran yang tersedia. Kondisi ini menyebabkan proses pembangunan harus dilakukan secara bertahap berdasarkan skala prioritas yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Selain faktor anggaran, kondisi lingkungan juga memengaruhi pembangunan jalan di Kecamatan Lawang Kidul. Curah hujan yang tinggi serta sistem drainase yang kurang optimal menyebabkan air sering menggenangi permukaan jalan. Genangan air tersebut mempercepat kerusakan lapisan aspal dan menurunkan kualitas konstruksi jalan. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut menyebabkan biaya pemeliharaan jalan menjadi semakin besar.

Faktor penghambat lainnya adalah lemahnya pengawasan terhadap kendaraan bertonase besar yang menggunakan jalan umum. Berdasarkan hasil penelitian, masih ditemukan kendaraan yang membawa muatan melebihi kapasitas jalan sehingga mempercepat kerusakan infrastruktur. Kurangnya pengawasan terhadap aktivitas kendaraan berat membuat upaya perbaikan jalan yang dilakukan pemerintah menjadi kurang efektif karena kerusakan terus berulang.

Menurut teori pembangunan Soetomo, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh tersedianya sumber daya dan kebijakan pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat serta kerja sama antaraktor pembangunan. Oleh karena itu, untuk mengatasi berbagai hambatan yang ada diperlukan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Dengan adanya kerja sama yang kuat, berbagai permasalahan yang menghambat pembangunan dapat diminimalkan sehingga pembangunan infrastruktur jalan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Lawang Kidul meliputi dukungan pemerintah, kontribusi perusahaan, partisipasi masyarakat, dan potensi ekonomi daerah. Sementara itu, faktor penghambatnya meliputi tingginya aktivitas kendaraan berat, keterbatasan anggaran, kondisi lingkungan, serta lemahnya pengawasan terhadap penggunaan jalan. Oleh karena itu, sinergi seluruh

pihak menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur jalan yang berkualitas dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.

KESIMPULAN

Dinamika politik pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Lawang Kidul pada aktivitas perusahaan alat berat melibatkan hubungan yang kompleks antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Pembangunan jalan tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi, sosial, dan politik dari berbagai pihak yang terlibat. Pemerintah daerah berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan jalan, sedangkan perusahaan berkontribusi melalui program CSR untuk membantu perbaikan infrastruktur. Namun, tingginya aktivitas kendaraan alat berat dan angkutan batu bara menjadi penyebab utama kerusakan jalan yang terjadi secara berulang. Faktor pendukung pembangunan meliputi komitmen pemerintah, kontribusi perusahaan, partisipasi masyarakat, serta potensi ekonomi daerah. Sementara itu, faktor penghambatnya meliputi keterbatasan anggaran, tingginya intensitas kendaraan berat, kondisi lingkungan yang kurang mendukung, serta lemahnya pengawasan terhadap penggunaan jalan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi, koordinasi, dan kerja sama yang lebih kuat antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat agar pembangunan infrastruktur jalan dapat berjalan secara efektif, berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Kecamatan Lawang Kidul.

REFERENCES

Ahmad Susilo. (2023). Tanggung jawab sosial perusahaan tambang batu bara PT X. *Indonesia Sosial Teknologi*.

Akbar. (2022). Evaluasi Jalan Tambang pada tambang batubara di PT. Lamindo Intermultikon. *Jurnal Science and Technology*.

Devanda, N. (2025). *Dinamika Politik Anggaran Dalam Penyusuna Anggaran Kerusakan Jalan Di Kabupaten indragiri hulu tahun2023*. *12*, 1–8.

Ermelinda Ngeni, K. R. (2025). *Dinamika sosial masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan oleh PT. Cipta Bangun Nusantara (CBN) di desa Ulubelu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada*. *1*(2), 132–143. https://doi.org/10.71241/tx263908

Fefriyanto. (2025). Konflik kepentingan dalam pengangkutan batu bara antara PT Gie dengan masyarakat simpang raja. *Jurnal Pendidikan Indonesia*.

Gandus, J. K., Harianja, M. S., Ropik, A., & Azzuhri, H. (2026). *Gerakan Masyarakat Terhadap Perbaikan Infrastruktur Jalan (Studi Kasus Jl . Lettu Karim Kadir Kelurahan Karang*. *2*, 1–8.

Hagai, G., Raja, H., & Ekayanta, F. B. (2025). *Politik Pembangunan Jalan Raya di Kawasan Liang Melas Datas , Kabupaten Karo Tahun 2022-2023*. 1–12. https://doi.org/10.32734/ljsp.v4i1.20390

Palazzolo, D. J. (2023). Qualitative Data Analysis. *Experiencing Citizenship: Concepts and Models for Service-Learning in Political Science*, 109–118. https://doi.org/10.4324/9781003444718-9

Papers, O. W., & Governance, P. (2020). *OECD Infrastructure Governance Indicators Conceptual framework , design , OECD Infrastructure Governance Indicators*.

Putri, R. T., Sjaf, S., & Wahyuni, E. S. (2021). *Kontestasi Aktor dalam Pengelolaan Dana Desa Actor Contestation in Village Fund Management*. *09*(03).

Samiruddin, K. (2025). Analisis Implementasi sosial terhadap jalan di kecamatan konawe utara. *Jurnal Kajian Indonesia*.

Sutrisno. (2021). Penelitian Kualitatif: Metode Penelitian Kualitatif. *Jurnal EQUILIBRIUM*, *5*(January), 1–7.

UNPD. (1997). *Governance for sustainable human development*.